KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR tolak perpanjangan konsesi KCIC
Tanggal : Jumat, 09 Desember 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 10

DPR Tolak Perpanjangan Konsesi KCIC

Wakil rakyat ingin pengelolaan KCIC tak berlama-lama dipegang perusahaan asing.

Ficky Ramadhan
ficky@mediaindonesia.com

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) tak setuju dengan permintaan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) agar masa konsesi pengelolaan kereta cepat Jakarta-Bandung diperpanjang, dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

"Jangan diperpanjang, 50 tahun saja sudah cukup lama, apalagi 80 tahun, itu sama dengan dua generasi," ungkap anggota Komisi V DPR dari Fraksi NasDem Soehartono saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perhubungan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Ia berharap pengelolaan kereta cepat Jakarta-Bandung dapat segera murni diambil alih pemerintah, bukan berlama-lama dikelola oleh KCIC yang merupakan perusahaan patungan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium perusahaan kereta api Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co Ltd.

"Jangan sampai ditambah konsesinya. Kalau ditambah, itu jadi malapetaka. Tapi saya yakin tidak sampai 50 tahun nanti sudah diambil. Nasibnya sama seperti Freeport, diambil alih oleh negeri sendiri," tegasnya.

Pandangan yang sama juga disampaikan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra Sumail Abdullah. Ia bahkan mempertanyakan kapan Indonesia bisa balik modal jika pengelolaan kereta cepat Jakarta-Bandung dipegang asing.

"Tadi konsesinya membengkak, dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Kapan duit negara yang Rp7,3 triliun kembali, bisa kembali enggak ini? Setelah itu, apakah konsesi ini bisa diperpanjang atau langsung diambil alih pemerintah Indonesia dengan memperhatikan kondisi rul pada tahun itu?" kata Sumail.

Kenaikan biaya proyek

Permintaan perpanjangan masa konsesi dari KCIC itu disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal.

Di hadapan para wakil rakyat, ia menjelaskan permintaan itu disampaikan KCIC lewat surat pada 15 Agustus 2022 ke Kementerian Perhubungan.

"Tanggal 15 Agustus 2022 disampaikan bahwa PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi 80 tahun," kata Risal.

Ia memaparkan alasan KCIC meminta tambahan masa konsesi. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek kereta cepat dalam rangka memenuhi pendanaan yang mengalami kenaikan (*cost overrun*) sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

"Alasan kedua, untuk menjaga kesinambungan proyek kereta cepat sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan KCJB di berbagai aspek yang dapat menguntungkan *stakeholder* dan masyarakat," urai Risal.

Alasan KCIC yang terakhir, sambungnya, untuk mewujudkan keberhasilan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sehingga dapat mempererat hubungan bilateral kedua negara.

Akhir November lalu, Komisi VI DPR menyetujui tambahan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2022 sebesar Rp3,2 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mengalami *cost overrun*. (E-2)